

THE LEADERSHIP OF REGENT MAWARDI YAHYA IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN OGAN ILIR REGENCY SOUTH SUMATRA 2005-2015

Kepemimpinan Bupati Mawardi Yahya Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan 2005-2010

Muhammad Sultan Fahkhri Arya Sena^{1(*)}, Syafruddin Yusuf²

Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

¹msutan09@gmail.com

²syafruddin_yusuf@fkip.unsri.ac.id

(*) Corresponding Author
msutan09@gmail.com

How to Cite: Muhammad Sultan Fahkhri Arya Sena, Syafruddin Yusuf. (2025). The Leadership Of Regent Mawardi Yahya In Infrastructure Development In Ogan Ilir Regency South Sumatra 2005-2015. doi: 10.36526/js.v3i2.6505

Abstract

This study analyzes the leadership of Regent Mawardi Yahya in the infrastructure development of Ogan Ilir Regency, South Sumatra, from 2005 to 2015. Ogan Ilir Regency, a division of Ogan Komering Ilir Regency in 2004, underwent significant transformation under the leadership of Mawardi Yahya, who was also a central figure in the division and held a strategic position within the Golkar Party. The research method used was historical, with heuristics, source criticism, interpretation, and historiography to produce an accurate reconstruction of events. The results show that in the 2005–2010 period, the leadership focused on building the foundations of government through the establishment of bureaucratic structures, the issuance of regional regulations, and the strengthening of institutional and fiscal systems. In the 2011–2015 period, the focus shifted to physical development, including the Tanjung Senai Regional General Hospital, the Tanjung Senai Integrated Office Complex, the An-Nur Grand Mosque, the Sungai Rambutan Independent Integrated City, and the inter-regional road and bridge network. This development improves mobility, access to public services, regional connectivity, and economic growth, demonstrating Mawardi Yahya's visionary and effective leadership, earning him the nickname "Father of Development" of Ogan Ilir Regency.

Received: 07-09-2025

Revised: 15-10-2025

Accepted: 09-11-2025

Keywords:

Leadership,
Infrastructure Development,
Mawardi Yahya,
Ogan Ilir Regency.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mengarahkan sekelompok orang agar melakukan suatu kegiatan, menciptakan kondisi yang mendukung, serta mendorong kerja sama di antara anggota kelompok. Beberapa ahli menyatakan bahwa kepemimpinan adalah tindakan yang memengaruhi orang lain atau bawahan agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, kepemimpinan juga merupakan kemampuan individu untuk memengaruhi bawahan sehingga mereka melaksanakan arahan atau keputusan pimpinan meskipun hal itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan pribadi mereka (Siata & Sasono, 2024).

Kepemimpinan muncul di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir dan resmi dibentuk pada 7 Januari 2004. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Onderafdeeling Ogan Ilir dan Onderafdeeling Ogan Komering Ilir digabung menjadi satu wilayah administratif bernama Gun, setara dengan kecamatan. Selanjutnya, kedua wilayah ini digabung dan ditetapkan sebagai satu kesatuan administratif (Aldi et al., 2021).

Pemekaran Kabupaten Ogan Ilir dipelopori oleh Mawardi Yahya, yang memegang peran sentral dalam pembentukan daerah tersebut. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (1994–2004), ia menjadi tokoh utama yang mendorong pemekaran hingga terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir. Dedikasi dan perjuangannya membangun kepercayaan masyarakat, khususnya warga Kecamatan Pemulutan Barat, sehingga mendukung terpilihnya Mawardi Yahya sebagai Bupati Ogan Ilir selama dua periode (2005–2010 dan 2010–2015) (Suara Sumsel News, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif dalam pembentukan daerah baru dapat memperkuat legitimasi dan dukungan politik seorang pemimpin, yang mencerminkan posisi Mawardi Yahya dalam struktur politik atau suprastruktur sebagai Bupati (Sekretariat Daerah Ogan Ilir, 2025).

Mawardi Yahya juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar), yang mencerminkan latar belakang politik keluarganya. Partai Golkar menjadi pengusungnya bersama Wasir Nofiandi pada Pilkada tahun 2005 dan 2015. Dalam struktur partai, ia menempati posisi strategis tertinggi sebagai ketua, memperkuat pengaruh politiknya. Selama masa jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir, Mawardi Yahya berperan penting dalam pembangunan infrastruktur. Hasil pembangunan ini masih terlihat hingga kini. Sebagai Bupati pertama, ia menunjukkan kepemimpinan yang kuat melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara efektif. Karena keberhasilannya dalam memajukan infrastruktur dan memperkuat fondasi pembangunan daerah, ia dikenal sebagai “Bapak Pembangunan” Kabupaten Ogan Ilir.

Di bawah kepemimpinannya, Mawardi Yahya berhasil membangun kompleks perkantoran terpadu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Tanjung Senai, yang selain menjadi pusat pemerintahan, juga menambah daya tarik wisata. Ia juga memprioritaskan pemerataan pembangunan jalan di setiap kecamatan, serta membangun jembatan penghubung antar desa untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas wilayah. Di sektor pendidikan, ia meluncurkan program Satu Desa Satu PAUD untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini di seluruh Kabupaten Ogan Ilir. Melalui program dan kebijakan ini, Mawardi Yahya dinilai berhasil mempercepat pembangunan daerah dan membuka wilayah yang sebelumnya terisolasi.

Mawardi Yahya merupakan tokoh penting dalam pemekaran Kabupaten Ogan Ilir, dengan sumber kekuasaan yang berasal dari kepercayaan tinggi masyarakat terhadap kepemimpinannya. Ia dikenal sebagai bupati yang kompeten dan berhasil mengelola pemerintahan daerah, serta membawa kemajuan signifikan terutama dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Ogan Ilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi sejarah sebagai dasar, yang merupakan pendekatan umum dalam kajian sejarah. Metode sejarah sendiri merupakan cara untuk memahami peristiwa sejarah, sedangkan metodologi sejarah lebih menekankan pada upaya memahami “cara memperoleh pengetahuan tentang sejarah” secara sistematis.

Dalam penelitian berjudul *Kepemimpinan Bupati Mawardi Yahya dalam Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan Tahun 2005-2015*, metode penelitian sejarah digunakan dengan mengikuti empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Keempat tahapan ini saling terkait dan membentuk proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, menafsirkan, serta menuliskan fakta-fakta sejarah, sehingga menghasilkan rekonstruksi peristiwa masa lalu yang akurat dan bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Infrastruktur Masa Kepemimpinan Mawardi Yahya sebagai Bupati Periode 2005-2010

1. Tahun 2005

Pada periode awal pemekaran Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005, pembangunan fisik belum dapat dilaksanakan karena pemerintah daerah masih berfokus pada pembentukan struktur birokrasi dan tata pemerintahan. Keterbatasan anggaran serta belum tersusunnya rencana pembangunan menjadi kendala utama dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005, dibentuklah Sekretariat Daerah beserta bagian-bagiannya, termasuk

Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi. Selain itu, ditetapkan pula pembentukan Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administratif bagi lembaga legislatif daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah lainnya untuk memperkuat struktur pemerintahan, seperti pembentukan dinas-dinas daerah melalui Perda Nomor 02 Tahun 2005, instansi teknis daerah melalui Perda Nomor 03 Tahun 2005, serta pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja melalui Perda Nomor 04 Tahun 2005. Di tahun yang sama, ditetapkan pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Ogan Ilir sebagai dasar arah pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Fokus utama pada masa ini adalah menata sistem pemerintahan yang efektif dan efisien agar dapat meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan daerah di masa mendatang.

2. Tahun 2006

Satu tahun setelah dimulainya penyusunan tatanan pemerintahan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ogan Ilir belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Pemerintah daerah pada tahun 2006 lebih memusatkan perhatian pada penyusunan dan pengundangan peraturan daerah di bidang perpajakan sebagai langkah awal optimalisasi pendapatan asli daerah. Salah satu kebijakan penting yang diterbitkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel, yang mengatur pungutan atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk penginapan, fasilitas pendukung, dan penyewaan ruang pertemuan dengan tarif pajak sebesar 10 persen. Kebijakan ini menjadi dasar dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui sektor pajak daerah.

Selain pajak, pemerintah daerah juga menetapkan berbagai peraturan mengenai retribusi untuk memperkuat pendapatan daerah. Salah satu di antaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang mengatur tarif retribusi berdasarkan jenis kendaraan dengan kisaran Rp500 hingga Rp3.000. Retribusi sendiri dipahami sebagai pungutan daerah atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memanfaatkan potensi pendapatan lokal secara maksimal, sekaligus memperbaiki tata kelola pelayanan publik agar lebih transparan dan efisien.

Dalam aspek perizinan, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bertujuan mengatur dan mengawasi pendirian bangunan agar sesuai dengan ketentuan teknis dan tata ruang wilayah. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor, sekaligus mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di daerah. Secara keseluruhan, fokus utama pemerintah daerah pada tahun 2006 adalah memperkuat landasan hukum dalam bidang perpajakan, retribusi, dan perizinan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, mempercepat pelayanan publik, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

3. Tahun 2007

Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir masih berfokus pada penerbitan peraturan daerah tentang retribusi, seperti Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengoperasian Becak Bermotor, serta memperkuat tata kelola keuangan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Setelah itu, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007–2017, yang membagi wilayah menjadi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung mencakup perlindungan setempat, hutan kota, kawasan rawan bencana, dan cagar budaya, sedangkan Kawasan Budidaya meliputi sektor pertanian, permukiman, industri, pertambangan, dan pariwisata. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur arah pembangunan fisik daerah, memastikan penggunaan lahan yang efisien, serta mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mengoptimalkan potensi sumber daya alam Kabupaten Ogan Ilir.

4. Tahun 2008

Pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan penataan besar terhadap struktur pemerintahan daerah dengan membentuk berbagai organisasi dan institusi baru melalui beberapa peraturan daerah. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 mengatur pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, yang berperan penting dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan dan fungsi legislatif. Selanjutnya, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 membentuk 15 dinas daerah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 menetapkan pembentukan instansi teknis daerah seperti Bappeda, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian. Pemerintah juga menetapkan Perda Nomor 10 dan 12 Tahun 2008 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Pemulutan dan Tanjung Raja untuk mengarahkan pembangunan kota yang terencana dan berkelanjutan. Selain itu, Perda Nomor 13 Tahun 2008 membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Unit PBK di bawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang bertugas menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini bertujuan memperkuat kelembagaan pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta menata pembangunan daerah agar lebih terarah dan terpadu.

5. Tahun 2009

Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menetapkan beberapa peraturan daerah penting, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Pengelola Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit di Kecamatan Indralaya Utara, yang berfungsi mengoordinasikan kegiatan perencanaan, penganggaran, agribisnis, pengembangan SDM, tata ruang, dan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan serta menarik investasi di wilayah transmigrasi. Selain itu, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 dan Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Rantau Alai dan Muara Kuang untuk periode 2009–2019, yang bertujuan menjaga konsistensi pertumbuhan kawasan perkotaan, menciptakan keserasian pembangunan dengan wilayah sekitarnya, serta mengarahkan pemanfaatan ruang bagi pembangunan fasilitas umum seperti perumahan, pasar, puskesmas, dan sarana sosial lainnya.

6. Tahun 2010

Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menetapkan beberapa peraturan penting yang menjadi dasar arah pembangunan daerah. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010–2015, yang memuat visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, sekaligus mencabut RPJMD periode sebelumnya (2005–2010). Selain itu, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama, yang bertujuan mengatur pembangunan menara secara tertib, efisien, dan berwawasan lingkungan agar penyelenggaraannya aman, estetis, serta memiliki kepastian hukum. Pemerintah juga mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam konteks pemerintahan, Bupati Mawardi Yahya menunjukkan komitmen kuat untuk membangun fondasi pemerintahan yang solid dan mandiri. Melalui penerbitan berbagai perda sejak awal kepemimpinannya, ia berupaya menata sistem birokrasi yang transparan dan sesuai prinsip otonomi daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat kelembagaan pemerintahan, mengatur kebijakan fiskal melalui sistem pajak yang tertib, serta meningkatkan pendapatan asli daerah agar Ogan Ilir tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Dengan langkah tersebut, Mawardi Yahya

berhasil meletakkan dasar pemerintahan yang kuat dan efisien, yang menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir pada periode-periode berikutnya.

Pembangunan Infrastruktur Masa Kepemimpinan Mawardi Yahya sebagai Bupati Periode 2011-2015

1) Tahun 2011

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir belum melaksanakan pembangunan infrastruktur secara fisik, melainkan fokus pada tahap Detail Engineering Design (DED), yaitu proses perencanaan teknis rinci untuk menghasilkan gambar kerja konstruksi yang siap dilaksanakan. Tahap perencanaan ini berlangsung selama kurang lebih satu tahun dan mencakup berbagai proyek strategis, seperti RSUD Tanjung Senai, Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, Masjid Agung An-Nur, jalan menuju pusat perkantoran Tanjung Senai, Kota Terpadu Mandiri Sungai Rambutan, serta sejumlah jembatan penting seperti Jembatan Pesona Tanjung Senai, Jembatan Rangka Baja Kertabayang, Tanabang, Sejangko–Sungai Rotan, dan Tanjung Baru. Perencanaan ini menjadi dasar utama bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Ogan Ilir pada tahun-tahun berikutnya.

2) Tahun 2012-2014

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ogan Ilir mencakup berbagai sektor, termasuk kesehatan, perkantoran, ibadah, dan permukiman. Salah satu proyek utama adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Senai yang dibangun di lahan ±10,5 hektar dengan bangunan pertama gedung administrasi pada 2008. Pembangunan berlanjut hingga 2013, dan pada 2015 RSUD Tanjung Senai resmi menjadi rumah sakit tipe D dengan izin operasional tetap. Selain itu, pembangunan Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai dilakukan untuk memusatkan layanan publik, termasuk pelebaran jalan dan relokasi fasilitas, serta Masjid Raya An-Nur yang mulai beroperasi pada 2016 dan resmi digunakan masyarakat pada Januari 2017. Selain fasilitas gedung, akses menuju Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai juga diperhatikan. Kawasan ini hanya dapat diakses melalui dua pintu gerbang utama dengan jalur utama melalui Jalan Koramil, yang strategis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang datang dari Palembang. Di sisi lain, Kabupaten Ogan Ilir juga mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sungai Rambutan dan Parit sebagai lokasi transmigrasi, yang meliputi 19.281,76 hektar dengan 6.441 kepala keluarga. Kegiatan utama masyarakat di sana fokus pada pertanian, seperti padi, karet, dan kelapa sawit, untuk meningkatkan taraf hidup dan menyebarkan penduduk.

Pembangunan jembatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah. Jembatan Pesona Tanjung Senai menjadi ikon daerah dengan panjang 60 meter dan lebar 7 meter, menghubungkan Kelurahan Indralaya Raya dengan Kompleks Perkantoran Terpadu. Jembatan ini mendukung mobilitas pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik. Selain itu, Jembatan Sejangko-Sungai Rotan, Jembatan Rangka Baja Tanjung Baru-Burai, Jembatan Rangka Baja Kertabayang, dan Jembatan Rangka Baja Tanabang dibangun untuk menghubungkan desa-desa yang sebelumnya terisolasi, memperlancar akses ke pusat pemerintahan, serta membuka konektivitas antar kabupaten.

Perencanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara matang melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2011. Proses ini memakan waktu sekitar satu tahun untuk memastikan proyek sesuai kebutuhan teknis dan sosial masyarakat. Hasil perencanaan tersebut diwujudkan mulai 2012 hingga 2014 dengan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya secara bersamaan, menandai komitmen pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk pembangunan yang efisien, terarah, dan berkualitas.

Dampak pembangunan infrastruktur tersebut sangat terasa bagi masyarakat. Mobilitas warga meningkat, perdagangan dan ekonomi lokal berkembang, serta daerah yang sebelumnya terisolasi kini terhubung dengan pusat layanan publik. Selain itu, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi menjadi lebih mudah, menunjukkan bahwa perencanaan matang

dan pelaksanaan konsisten mampu membawa perubahan signifikan dalam pembangunan daerah Kabupaten Ogan Ilir.

PENUTUP

Kepemimpinan Mawardi Yahya sebagai Bupati Kabupaten Ogan Ilir pada periode 2005–2015 menunjukkan peran strategis dalam membangun fondasi pemerintahan serta memajukan pembangunan infrastruktur daerah. Pada periode pertama (2005–2010), fokus utama pemerintahannya adalah membangun struktur birokrasi dan kelembagaan pemerintahan yang solid melalui penerbitan berbagai peraturan daerah di bidang organisasi, pajak, retribusi, perizinan, dan tata ruang wilayah. Langkah ini memperkuat fondasi administrasi, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan menciptakan kepastian hukum serta tata kelola yang efektif, sehingga Ogan Ilir siap menghadapi pembangunan fisik dan sosial secara berkelanjutan.

Memasuki periode kedua (2011–2015), pemerintahan Mawardi Yahya bergerak pada tahap implementasi pembangunan infrastruktur. Tahap perencanaan teknis rinci (Detail Engineering Design/DED) dilakukan pada 2011, diikuti oleh pembangunan fisik mulai 2012 hingga 2014, mencakup sektor kesehatan (RSUD Tanjung Senai), perkantoran (Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai), ibadah (Masjid Agung An-Nur), permukiman (Kota Terpadu Mandiri Sungai Rambutan), serta konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jembatan dan pelebaran jalan. Pembangunan infrastruktur ini meningkatkan mobilitas, memperlancar akses pelayanan publik, membuka daerah terisolasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kombinasi perencanaan strategis di periode pertama dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di periode kedua, Mawardi Yahya berhasil menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan efektif. Ia tidak hanya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga mewujudkan pembangunan nyata yang memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan fisik Kabupaten Ogan Ilir, sehingga mendapatkan pengakuan sebagai “Bapak Pembangunan” daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, A., Hawali, E. G., Irwan, M., Syarifuddin, S., & Supriyanto, S. (2021). Sistem Pemerintahan Order Afdeling Ogan Ilir Tahun 1906-1942. *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah*, 7(2), 93. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v7i2.10025>.
- Andryana. (2016). Redi Andryana, 2016 Republik Persatuan Arab Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu.
- Angelina, D., & Wahyuni, K. T. (2021). Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2015-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*. 2021(1). 733–742. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.1025>.
- Aqil, A. D. C. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Pamenang*. 2(2). 1–6. <https://doi.org/10.53599/jip.v2i2.58>.
- Sintya Dwi Awwalin. 2023. *Menilik Kondisi Sosial-Politik Indonesia Tahun 1973-1997 Melalui Novel Wasripin Dan Satinah Karya Kuntowijoyo*. repository.upi.edu.perpustakaan.upi.edu. 32–51.
- Devi. (2024). Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas, 10.59603/masman.v2i2.387. *MASMAN : Master Manajemen*. Vol.2. No.2. 2024. hal 69. 2(2).
- Dewi, Hasanah Ratna. (2015). *GURU DUA ZAMAN: Kajian terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Guru di Indonesia Tahun 1967 - 2010 Universitas Pendidikan Indonesia*. repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. 38–56.
- Fadli. (2021). *Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. Medan: Restu Printing Indonesia. Hal.52. 1(1). 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fadlillah. (2024). *Perkembangan Industri Rumah Tangga Oncom dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Pasir Reungit Kabupaten Sumedang 1992-2019*. 5(3), 248–253.

- Ginting, R. B. (2024). Plagiarism Checker X Originality Report. *Jurnal Edudikara*. 2(2). 3–5.
- Irfani, A. (2024). Upaya Guru Sejarah Kebudayaan Islam pada Pembentukan Karakter Religius Siswa Kelas VII di SMP Islam Al-Hadi Mojolaban Tahun Ajaran 2023/2024. *Journal GEEJ*. 7(2).
- Kotamobagu, P. K., Mokodongan, D., Mantiri, M., & Kumayas, N. (2019). Alfonkimbal,+Dadang+Mokodongan. 3, 1–12.
- Sebayang, S. (2019). Formulasi Model Pembangunan Infrastruktur Pada Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.
- Siata, Z., & Sasono, H. (2024). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin Terhadap Kinerja (Study Kasus Hotel NEO, Kebayoran Jakarta). *GLORY (Global Leadership Organizational Research in Management)*, 2(2), 38–53. <https://doi.org/10.59841/glory.v2i2.951>.
- Wulan. (2021). Implementasi Model IPE (Interprofessional Education) Pada Upaya Meningkatkan Kompetensi Pembelajaran Mahasiswa Pada Fakultas Ilmu Kesehatan. 167–186.